

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berawal dari fenomena kultur patriarki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik. Budaya patriarki ini tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini bisa dijumpai dalam beragam aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, sampai hukum. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menyelesaikan ketidakadilan pada kaum perempuan. Salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam sosial dan politik adalah karena adanya kultur patriarki yang membatasi akses partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Akibatnya kaum perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. (Halizah, L. R, 2023)

Sampai saat ini kultur patriarki masih berkembang di tatanan masyarakat Indonesia, sehingga muncul masalah sosial yang terus membebani kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Indonesia merupakan negara hukum, namun pada kenyataannya dasar hukum tersebut belum mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Penyebab terjadinya diskriminasi pada perempuan masih sama yakni perempuan masih dianggap hanya memiliki peran domestik. sehingga penegakan hukum masih lemah dan terjadi ketidakadilan gender. (Sakina, A. I. 2017).

Partai politik bukan hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga ruang strategis untuk mendorong perubahan sosial yang inklusif. Dalam konteks ini, partai politik menjadi tempat penting bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan kepemimpinan publik. Keterlibatan perempuan dalam partai politik bukan hanya tentang representasi angka, tetapi juga tentang makna kehadiran mereka dalam membentuk arah kebijakan dan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk hak-hak perempuan. Perjuangan perempuan dalam dunia politik tidak selalu mudah. Mereka sering kali menghadapi hambatan struktural, kultur patriarki, dan stereotip gender yang membatasi peran mereka dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik harus mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan secara setara melalui implementasi kebijakan rekrutmen calon legislatif, pembinaan kepemimpinan perempuan, serta membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya calon anggota legislatif perempuan di parlemen, dengan terlibatnya perempuan melalui partai dengan implementasi kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya calon anggota legislatif perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam bidang politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki sebuah peningkatan. Banyak para perempuan yang terjun langsung dalam politik praktis. Berdasarkan data terdapat peran perempuan yang mengemban amanah atau jabatan sebagai menteri pada kabinet, selain itu kaum perempuan kini berhasil menjadi pemimpin seperti kepala daerah. Keterlibatan perempuan tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi perempuan juga aktif bergabung di partai politik yang ada. Salah satunya Partai Gerindra yang mengimplementasikan kebijakan rekrutmen perempuan dengan tahapan dan prosedur yang tercatat Partai Gerindra mengimplementasikan rekrutmen pada seluruh lapisan masyarakat dan kaum perempuan. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih harus tetap diperjuangkan. Karena, semakin banyak

perempuan yang terjun secara langsung dalam politik, maka semakin besar kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini belum secara maksimal diberikan oleh Negara.

Untuk meningkatkan peran perempuan di masa yang akan datang, pemahaman mengenai isu kesetaraan gender sangatlah penting. Kesetaraan dan keadilan gender adalah syarat atau bentuk dorongan untuk membangun masyarakat yang adil. Oleh sebab itu perjuangan perempuan perlu terus dilakukan dan menumbuhkan kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya peran perempuan.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan, serta untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, adalah dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Secara harfiah, istilah pemberdayaan berasal dari kata "empowerment," yang berakar dari kata dasar power atau kekuasaan. Oleh karena itu, inti dari pemberdayaan perempuan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Ini berarti pendekatan yang digunakan harus menempatkan perempuan sebagai subjek dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai objek pembangunan.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 28I (2) menyebutkan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif." Pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun kelompok. Indonesia pada dasarnya sudah memihak kepada kaum perempuan. Dalam hal pendidikan, pada saat ini banyak kaum perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak hanya dalam pendidikan saja, akan tetapi perempuan juga berperan penting dalam membangun Negara. (Kiftiyah, 2019)

Perempuan dapat terlibat dalam bidang politik berdasarkan Peraturan KPU No 10 tahun 2023 tentang kewajiban partai politik untuk memasukkan bakal calon perempuan legislatif minimal 30% dari jumlah bakal calon laki laki di daerah pemilihan. Salah satu Partai yang turut mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan rekrutmen partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di

daerahnya yaitu partai Gerindra dengan bakal calon yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai dengan didukung lingkungan implementasi atau pengalaman yang ada, Partai Gerindra mampu memberikan dorongan pada caleg perempuan untuk menduduki kursi parlemen dengan syarat dan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan rekrutmen anggota legislatif perempuan oleh Partai Gerindra yang mampu menduduki kursi parlemen selama dua periode, karena jika tidak memiliki elektabilitas yang tinggi serta pengalaman di dalam daerah pemilihan maka tidak akan mudah untuk menduduki kursi di parlemen. Menilai prosedur dan persyaratan yang spesifik Partai Gerindra tidak hanya mampu memenuhi peraturan yang diberikan KPU tetapi, dengan dedikasinya anggota legislatif terus berperan aktif dalam mewakili daerah pemilihan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Jember khususnya dapil 7 melalui lembaga legislatif daerah.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah menjadi isu penting dalam demokrasi dan kesetaraan gender. Di antara perempuan yang berhasil hanya sebagian kecil yang mampu mempertahankan kursi legislatif selama dua periode atau lebih. Perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif tentu saja dinilai melalui pengalaman yang lebih matang dan jejaring politik yang kuat. Pengalaman legislatif cenderung memiliki kapasitas politik yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih baik dalam membangun sinergi dengan masyarakat sipil. Membangun sinergi dengan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, Perempuan perlu diperhatikan karena saat ini tidak sedikit yang mampu memberikan peran penting. Pada pemilu 2024 Calon legislatif partai yang diusung oleh Gerindra merupakan calon legislatif yang memiliki dedikasi dan elektabilitas tinggi sebagai bentuk representasi masyarakat pada parlemen.

Partai politik dan Calon legislatif melakukan sosialisasi tentang pentingnya perempuan dalam parlemen, namun dengan adanya kultur patriarki menjadi faktor terhambatnya implementasi rekrutmen di dapil. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur akademik, memberikan wawasan baru bagi penguatan kapasitas kaderisasi dan mendorong kebijakan yang berbasis pada

kinerja dan karier politik perempuan, khususnya terkait bagaimana perempuan memenuhi prosedur rekrutmen partai politik. Oleh karena itu bagaimana partai politik mengimplementasikan prosedur rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana partai politik(Gerindra) mengimplementasikan Prosedur Kebijakan Rekrutmen Perempuan sebagai calon anggota legislatif pada daerah pemilihan dalam pemilu 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis proses, strategi, serta tantangan Partai Gerindra dalam Implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif pada daerah pemilihan dalam memenuhi ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dunia pendidikan serta kontribusi ilmiah dan menjadi referensi khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan dan pada kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai anggota legislatif Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan penalaran ilmu pemerintahan khususnya yang fokus pada implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif. Serta dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Jember.